

Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2021-2022

Diylnna Rahmawati*, Dr. Asnita Frida Sebayang

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*diynnarahmawatii@gmail.com, fridaasnita@gmail.com

Abstract. *Extreme Poverty is a condition of the inability of the community to meet basic needs, namely food, clean water, proper sanitation, health, housing, education and access to information on income and social services. Someone is categorized as extreme poor if the cost of their daily needs is below the extreme poverty line. This study aims to determine the effect of Population, Human Development Index and Provincial Minimum Wage on Extreme Poverty in 34 Provinces of Indonesia. The analysis method used in this study is regression of panel data with a Random Effect Model (REM) approach. Cross-section effect results obtained, there are two provinces that have the highest effect value, namely West Java Province of 267.1881 and East Java Province of 193.0410. The results of the analysis obtained, it can be seen that the variable Number of Population has a positive and significant effect on the variable of Extreme Poverty in 34 Provinces of Indonesia, and the variables of the Human Development Index and Provincial Minimum Wage have a negative and significant effect on the variable of Extreme Poverty in 34 Provinces of Indonesia.*

Keywords: *Extreme Poverty, Number of Population, Human Development Index, Provincial Minimum Wage.*

Abstrak. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan eskترم. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model (REM)*. Hasil *Cross-section effect* yang diperoleh, terdapat dua Provinsi yang memiliki nilai *effect* tertinggi yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 267.1881 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 193.0410. Hasil analisis yang diperoleh, dapat diketahui bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia, serta variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia.

Kata Kunci: *Kemiskinan Ekstrem, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terluas di Asia Tenggara dengan memiliki jumlah populasi penduduk yang besar serta selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Terlebih Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara berkembang yang terdiri dari beberapa pulau, tentunya memiliki cara tersendiri dalam mengatur roda perekonomian di setiap wilayahnya untuk membangun negeri ini. Pembangunan tentunya patut dilaksanakan sesuai ketentuan sistematis dan keselarasan guna terciptanya sebuah preferensi dengan arah tujuan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah ditetapkan pada pembangunan jangka menengah dan jangka pendek.

Salah satu indikator keberhasilan dari sebuah pembangunan di suatu negara yaitu dapat diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Pada banyak negara, pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, diharapkan sumber-sumber pertumbuhan tersebut dapat menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin (Maulana 2020).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dideklarasikan pada 25 September 2015 menempatkan pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun sebagai tujuan pertama dari 17 tujuan yang akan dicapai hingga 2030. Salah satu transformasi dalam SDGs adalah “*Leave no one behind*” yaitu mengupayakan pergeseran dari sebelumnya mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem menjadi mengakhiri kemiskinan ekstrem. Konsekuensi dari transformasi tersebut menuntut para pemangku kebijakan untuk mendesain tujuan pembangunan yang berfokus pada bagaimana menjangkau para kelompok marjinal (BPS Indonesia 2022).

Populasi penduduk yang hidup dalam kemiskinan tersebut, terdapat kelompok yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem merupakan jenis kemiskinan yang didefinisikan oleh (*United Nations*, 1996) yang menyatakan bahwa kemiskinan ekstrem adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, air bersih, sanitasi yang memadai, kebutuhan akan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga akses terhadap pelayanan sosial. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pendapatan per kapita harian kurang dari USD 1,91 PPP (*Purchasing Power Parity*), yang setara dengan Rp 9.089 per hari (TNP2K 2022). berikut disajikan data terkait angka kemiskinan ekstrem di Indonesia Tahun 2012-2021.

Tabel 1 Angka Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Tahun	Kemiskinan Ekstrem		
	Garis Kemiskinan	% Penduduk Miskin (P0)	JPM (Juta)
2012	238.288,5	11,7	28,50
2013	249.910,8	9,4	23,23
2014	261.647,7	7,9	19,86
2015	284.184,9	7,2	18,35
2016	285.184,9	6,5	16,76
2017	305.720,2	5,7	14,88
2018	316.736,1	4,7	12,42
2019	323.291,0	3,7	9,89
2020	345.291,6	3,9	10,54
2021	358.232,6	4,0	10,86

Sumber : Publikasi Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024 (TNP2K 2022).

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami penurunan, meskipun penurunan tersebut bersifat fluktuatif. Namun, diharapkan pada beberapa tahun mendatang angka kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mencapai 0% sebagaimana yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Tahun 2021 terlihat bahwa penduduk miskin telah menyentuh angka 4,0 persen dengan jumlah orang miskin ekstrem sebanyak 10,86 juta jiwa. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah tersebut, upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Supaya target angka kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada Tahun 2024 dapat tercapai, diperlukan program yang luar biasa (TNP2K 2022).

Presiden memberikan arahan dalam rapat terbatas terkait Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada Tanggal 4 Maret 2021, yang bertujuan untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada Tahun 2024, hal tersebut diperlukan tindakan percepatan dalam menangani kemiskinan ekstrem secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi dan program pemerintah yang sesuai. Program itu pun harus dipastikan dapat dieksekusi sebelum akhir 2021. Maka pada rapat terbatas pada 21 Juli 2021, pemerintah memutuskan bahwa dalam jangka pendek akan memfokuskan program di wilayah dengan masalah kemiskinan ekstrem yang tinggi atau daerah yang memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi (Taufiq 2022).

Pada Tahun 2021, program pengentasan kemiskinan ekstrem akan difokuskan pada 35 Kabupaten yang tersebar di 7 Provinsi, yang telah dipilih karena mewakili 20% dari jumlah penduduk miskin nasional sebesar 10,4 juta jiwa. Artinya, program ini akan menyasar sekitar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga pada tahun ini. Provinsi yang menjadi fokus program ini adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua (TNP2K 2022).

Salah satu indikator pendukung untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah merupakan masalah yang mendasar. pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Jika diperhatikan masalah yang mempengaruhi tingkat kemiskinan bukan hanya karena pengangguran tetapi juga karena jumlah penduduk yang banyak atau dapat dikatakan kuantitas tidak mengimbangi kualitas (Suhandi et al. 2018).

Pentingnya mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui berbagai upaya, salah satunya adalah melalui pemberdayaan kualitas hidup manusia yang dapat diukur melalui penggunaan Indeks Pembangunan Manusia. Sejak kali pertama dirilis Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 1990, *United Nations Development Program* menggunakan tiga dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut adalah umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat pembangunan dari sisi manusia. Setiap indikator komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dapat dimanfaatkan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Secara kontekstual, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan perubahan pilihan-pilihan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai (BPS 2021).

Kebijakan mengenai upah minimum juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Konsep upah minimum telah diperkenalkan dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an, dengan tujuan untuk memastikan bahwa upah minimum setidaknya mencukupi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dalam jangka panjang. Diharapkan bahwa dengan demikian, tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka serta mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh. Melalui penerapan upah minimum yang memadai, diharapkan tingkat kemiskinan dapat ditekan dan kesejahteraan dapat ditingkatkan bagi pekerja (Akbar, Primandari, and Muhariah 2022).

Melalui pemaparan uraian dari latar belakang di atas, maka adapun judul yang akan diangkat pada penelitian ini adalah “Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2021 – 2022”.

B. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka dan dianalisis menggunakan data statistik. Dalam penelitian deskriptif ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan ataupun perbandingan dengan variabel lain (Mahroji and Nurkhasanah 2019). Dalam penelitian ini Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Provinsi merupakan variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu Kemiskinan Ekstrem. Metode ini menggunakan alat bantu kuantitatif yaitu *software E-views 12*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini untuk menentukan model regresi data panel dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Berikut pengujian model yang terbaik di 34 Provinsi Indonesia :

Tabel 2 Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	Statistic	d.f.	Prob
<i>Cross-section F</i>	33.349767	(33,31)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	244.619776	33	0.0000

Sumber : Hasil olah data E-Views 12.0

Tabel 2 dari Uji Chow yang dilakukan, diperoleh hasil dari nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang artinya nilai probabilitas di atas kurang dari nilai signifikansi 5% ($0.0000 < 0,05$) atau H_0 ditolak dan *Fixed Effect Model (FEM)* yang digunakan di 34 Provinsi Indonesia.

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
<i>Cross-section random</i>	2.465480	3	0.4816

Sumber: Hasil olah data E-Views 12.0

Tabel 3 dari Uji Hausman yang dilakukan, diperoleh hasil dari nilai probabilitas sebesar 0,4816 yang artinya nilai probabilitas di atas lebih dari nilai signifikansi 5% ($0.0000 > 0,05$) atau H_0 diterima, sehingga model yang dapat digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*.

Tabel 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Type Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	30.06686 (0.0000)	0.99799 (0.3178)	31.06486 (0.0000)

Sumber: Hasil olah data E-Views 12.0

Tabel 4 dari Uji *Lagrange Multiplier* yang dilakukan, diperoleh hasil dari nilai *Cross-section Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 yang artinya nilai tersebut lebih kecil daripada 5% ($0.0000 > 0,05$) maka H_0 ditolak, sehingga model yang dapat digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*.

Dari hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* yang telah dilakukan, maka dinyatakan bahwa *Random Effect Model* merupakan model yang sesuai untuk model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini menggunakan pendekatan *Random Effect Model*.

Tabel 5 Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2851.640	1592.095	1.791124	0.0780
LOG(JP)	173.4000	22.89030	7.575261	0.0000
IPM	-14.24433	4.969077	-2.866595	0.0056
LOG(UMP)	-211.1167	104.8598	-2.013324	0.0483

R Squared	0.592957
F-statistic	31.07717
Prob (F-statistic)	0.000000
Durbin Watson-Stat	2.035068

Sumber : Hasil olah data E-Views 12.0

Tabel 4.2 hasil estimasi *Random Effect Model*, maka persamaan model dari variabel pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2021–2022 sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan Ekstrem } it = 2851.640 + 173.4000 \text{ LOG(JP) } it - 14.24433 \text{ IPM } it - 211.1167 \text{ LOG(UMP) } + eit$$

Persamaan tersebut menunjukkan sebagai berikut:

1. Apabila nilai dari variabel Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi besarnya sama dengan nol. Maka pengaruhnya pada variabel Kemiskinan Ekstrem yaitu sebesar 2.851.640 jiwa.
2. Jika Jumlah Penduduk mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan peningkatan pada Kemiskinan Ekstrem sebesar 173.400 jiwa.
3. Jika Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan penurunan Kemiskinan Ekstrem sebesar 14.244 jiwa.
4. Jika Upah Minimum Provinsi mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan penurunan Kemiskinan Ekstrem sebesar 211.116 jiwa.

Tabel 6 Hasil Cross Section Random Effect

No	<i>Cross Section Random Effect</i> Provinsi	<i>Effect</i>	No	<i>Cross Section Random Effect</i> Provinsi	<i>Effect</i>
1	Jawa Barat	267.1881	18	Bengkulu	10.02322
2	Jawa Timur	193.0410	19	D.I Yogyakarta	8.766353
3	Kalimantan Utara	175.6471	20	Sulawesi Tenggara	0.543904
4	Jawa Tengah	137.5181	21	Sulawesi Barat	-1.842396
5	Papua	108.7484	22	Kalimantan Tengah	-37.97945
6	Papua Barat	105.7119	23	Sulawesi Tengah	-50.20685
7	Gorontalo	94.06755	24	Jambi	-77.42696
8	Kep. Riau	85.59415	25	Bali	-87.60818
9	Kep. Bangka Belitung	79.37727	26	Riau	-97.68067
10	Maluku Utara	35.56395	27	Sulawesi Selatan	-99.06902
11	Sulawesi Utara	34.66438	28	Kalimantan Selatan	-112.3992
12	Maluku	30.20782	29	Nusa Tenggara Barat	-113.6843

<i>Cross Section Random Effect</i>			<i>Cross Section Random Effect</i>		
No	Provinsi	Effect	No	Provinsi	Effect
13	Aceh	26.67316	30	Lampung	-123.0354
14	Kalimantan Timur	24.13157	31	Sumatera Barat	-147.9052
15	Sumatera Selatan	16.51946	32	Banten	-153.4700
16	Nusa Tenggara Timur	14.90935	33	Sumatera Utara	-161.3791
17	DKI Jakarta	14.50021	34	Kalimantan Barat	-199.7101

Sumber : Hasil olah data E-Views 12.0

Tabel 6 menunjukkan bahwa Provinsi dengan nilai *effect* tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 267.1881, diposisi kedua berada di Provinsi Jawa Timur dengan nilai *effect* sebesar 193.0410. Tidak hanya terfokus pada dua Provinsi tertinggi, berikut terdapat dua Provinsi dengan nilai *effect* terendah yaitu berada di Provinsi Kalimantan Barat sebesar -199.7101 dan Provinsi Sumatera Utara sebesar -161.3791.

Tabel 7 Hasil Uji Statistik T

Variabel	t-Statistik	Prob	Hasil Uji	Hasil
JP	7.575261	0.0000	probabilitas $< \alpha = 0,05$	Signifikan
IPM	-2.866595	0.0056	probabilitas $< \alpha = 0,05$	Signifikan
UMP	-2.013324	0.0483	probabilitas $< \alpha = 0,05$	Signifikan

Sumber : Hasil olah data E-Views 12.0

Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia

Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan di atas, maka hasilnya menunjukkan bahwa t statistik sebesar 7.575261 dan *probability* sebesar 0.0000 dengan signifikansi 0.05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai Sig.Prob yang dihasilkan sebesar $0.0000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dari penelitian ini dapat diterima. Artinya bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan ekstrem di 34 Provinsi Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan (Sari 2021) yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas penduduk serta peningkatan sumber daya pangan akan menjadikan kemiskinan semakin meningkat, serta tidak terkendali dan menghambat proses pembangunan ekonomi.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia

Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan di atas, maka hasilnya menunjukkan bahwa t statistik sebesar -2.866595 dan *probability* sebesar 0.0056 dengan signifikansi 0.05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai Sig.Prob yang dihasilkan sebesar $0.0056 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dari penelitian ini dapat diterima. Artinya bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan ekstrem di 34 Provinsi Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kristin Ari P 2018) bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, Berkurangnya tingkat kemiskinan karena Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Hubungan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia

Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan di atas, maka hasilnya menunjukkan bahwa t statistik sebesar -2.013324 dan *probability* sebesar 0.0483 dengan signifikansi 0.05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai Sig.Prob yang dihasilkan sebesar $0.0483 < 0.05$. Hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis pertama dari penelitian ini dapat diterima. Artinya bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan ekstrem di 34 Provinsi Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan (Islami and Anis 2019) dalam penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan pada upah minimum provinsi tidak selalu diiringi oleh penurunan angka kemiskinan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fenomena yang memperlihatkan bahwa peningkatan pada upah minimum cenderung diikuti oleh terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK pada gilirannya akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini tentunya akan meningkatkan angka kemiskinan.

D. Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2021–2022, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Kemiskinan Ekstrem sebesar 57,3877% yang dapat dijelaskan dalam persamaan model. Sedangkan sisanya 42,6123% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam persamaan model.
2. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap Kemiskinan Ekstrem dapat dilihat dari hasil koefisien setiap variabel, yaitu variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 173.400, jika Jumlah Penduduk mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan peningkatan pada Kemiskinan Ekstrem Sebesar 173.400 jiwa. Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 14.244, jika Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan penurunan Kemiskinan Ekstrem sebesar 14.244 jiwa. Variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 211.116 jika, Upah Minimum Provinsi mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan penurunan Kemiskinan Ekstrem sebesar 211.116 jiwa.

Daftar Pustaka

- [1] Adellia Nur Fadhilah, and Yuhka Sundaya. 2023. “Analisis Ekonomi Pekerja Migran Indonesia Dalam Memilih Negara Tujuan Pada BP3MI Jabar.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*: 111–16. doi:10.29313/jrieb.v3i2.2856.
- [2] Akbar, Ali, Novegya Ratih Primandari, and Al Muhariah. 2022. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2017-2020.” *Equity: Jurnal Ekonomi* 10(02): 80–91. doi:10.33019/equity.v.
- [3] BPS. 2021. “Indeks Pembangunan Manusia 2021.” *Badan Pusat Statistik* 13(1): 104–16.
- [4] BPS Indonesia. 2022. “Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022.” : 1–243.
- [5] Islami, Nadia, and Ali Anis. 2019. “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1(3): 939. doi:10.24036/jkep.v1i3.7721.
- [6] Kristin Ari P. 2018. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 6(2): 233–34.
- [7] Mahroji, Dwi, and Iin Nurkhasanah. 2019. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten.” *Jurnal Ekonomi-Qu* 9(1). doi:10.35448/jequ.v9i1.5436.
- [8] Maulana, Fajar. 2020. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Periode 2015-2019.”
- [9] Sari, Yulia Adella. 2021. “Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah.” *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 10(2): 121–30.

- doi:10.35906/je001.v10i2.785.
- [10] Setiani, Nunung, Wawan Hermawan, and Ahmad Komarulzaman. 2023. “Pengujian Peran Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*: 153–60. doi:10.29313/jrieb.v3i2.2470.
 - [11] Suhandi, Nazori, Efri Ayu, Kartika Putri, and Sari Agnisa. 2018. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear Di Kota Palembang.” 09(2): 77–82.
 - [12] Taufiq, Nuri. 2022. “Penciri Kemiskinan Ekstrem Di 35 Kabupaten Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem.” : 895–904.
 - [13] TNP2K. 2022. “Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024.” : 1–20.